



Implementasi Program Indonesia Pintar dan Akses Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Probolinggo

Dinda Eka Wahyu Wardhana Saputri^{1*}, Gilbert Seno Rumbiak², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

¹⁻⁴Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Email Korespondensi: 25040674127@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu guna memastikan kelangsungan pendidikan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PIP di Kota Probolinggo menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di Kota Probolinggo belum berjalan secara optimal. Pada variabel komunikasi kebijakan, sosialisasi program masih terbatas sehingga banyak orang tua yang tidak memahami prosedur aktivasi rekening. Dari sisi sumber daya, kapasitas teknis dan kesiapan administrasi pelaksana di lapangan belum merata. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup positif, namun pemahaman terhadap mekanisme program masih bervariasi antarsatuan pendidikan. Struktur birokrasi yang melibatkan banyak institusi belum terkoordinasi secara optimal sehingga menghambat alur penyaluran bantuan. Berbagai hambatan tersebut berdampak pada keterlambatan pencairan dana dan tidak meratanya akses penerima manfaat terhadap program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, serta pembangunan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu untuk meningkatkan efektivitas implementasi PIP ke depan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Indonesia Pintar; Akses Pendidikan; Probolinggo; George C. Edwards III.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan yang dijamin secara Konstitusional, yang sangat penting bagi pertumbuhan negara. Pendidikan tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong mobilitas sosial yang lebih besar. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan yang baik dan merata harus memungkinkan masyarakat untuk memaksimalkan potensi mereka dan secara aktif berkontribusi pada kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil dan bebas dari hambatan struktural, termasuk hambatan yang disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, fakta sosial menunjukkan bahwa akses yang sama ke pendidikan masih menjadi masalah di beberapa wilayah Indonesia. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu seringkali tidak memiliki akses ke sekolah karena ketimpangan ekonomi yang masih ada di masyarakat. Untuk beberapa keluarga, biaya pendidikan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan belajar lainnya, dapat menjadi beban yang cukup besar. Kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan putus sekolah, terutama di lingkungan dengan tingkat kesejahteraan rendah. Kesenjangan akses pendidikan dapat memperlebar ketimpangan sosial dan menghambat upaya terus menerus untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah memulai berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dan meningkatkan akses ke pendidikan. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh program adalah Program Indonesia Cerdas (PIP), sebuah program bantuan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga berpenghasilan rendah melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi gap pendidikan dan meningkatkan sistem perlindungan sosial di sektor pendidikan. Pemerintah berusaha melalui program ini untuk membantu siswa memenuhi berbagai persyaratan akademik. Program Indonesia Pintar secara khusus memberikan bantuan tunai kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan. Bantuan ini diberikan kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, termasuk sekolah dasar. Secara umum, bantuan ini dimaksudkan untuk membantu keluarga peserta didik meringankan beban biaya pendidikan, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan. Bantuan pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi putus sekolah, terutama di kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, program bantuan pendidikan seperti PIP adalah bukti komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan kesetaraan pendidikan. Namun, keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada seberapa baik kebijakan dibuat, tetapi juga seberapa baik kebijakan tersebut diterapkan. Pada tahap siklus kebijakan publik yang disebut sebagai "implementasi kebijakan", berbagai aktor pelaksana mengubah kebijakan yang telah dikembangkan menjadi tindakan nyata. Tahap ini sangat penting. Menurut Sagala dan Lumbantobing (2020) dan Hastakriya (2023), seberapa baik kebijakan pendidikan dilaksanakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti ketersediaan sumber daya, koordinasi kelembagaan yang efektif, kejelasan mekanisme program, dan kesadaran

publik tentang program tersebut. Faktanya, melaksanakan kebijakan bantuan pendidikan daerah seringkali menghadapi sejumlah masalah administratif dan teknis. Contoh lain dari hal ini adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar di berbagai wilayah, termasuk Kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai tingkat sosial ekonomi. Meskipun terjadi kemajuan di bidang ini, sebagian warga setempat masih memiliki akses terbatas terhadap pendidikan karena keadaan keuangan keluarga mereka. Dalam hal ini, Program Pintar Indonesia adalah alat kebijakan penting untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah tetap menerima pendidikan.

Namun, tujuan kebijakan nasional dari Program Indonesia Pintar tidak selalu tercapai dengan sukses di tingkat regional. Hasil lapangan awal menunjukkan bahwa proses implementasi program menghadapi sejumlah masalah. Beberapa masalah yang sering terjadi termasuk keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktahuan orang tua tentang prosedur administrasi seperti mengaktifkan rekening bantuan, dan kurangnya koordinasi antara lembaga pendanaan dan sekolah. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak sepenuhnya memahami mekanisme program, yang dapat menyebabkan ketidakefektifan selama proses implementasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa program bantuan sosial sering menghadapi banyak masalah operasional. Menurut Purwanto (2023) dan Utomo (2024), beberapa komponen masyarakat yang dapat mempengaruhi seberapa efektif pelaksanaan kebijakan sosial adalah komunikasi kebijakan yang buruk, kekurangan sumber daya administrasi, dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme program. Selain itu, statistik dari nasional dan provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa bantuan pendidikan masih diterima secara tidak merata di beberapa daerah, meskipun kuota bantuan terus meningkat setiap tahunnya. Situasi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tujuan kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dan bagaimana mereka diimplementasikan di tingkat daerah.

Dalam studi implementasi kebijakan publik, banyak faktor yang saling berkaitan mempengaruhi keberhasilan program. Salah satu model implementasi kebijakan yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah yang diusulkan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards (1980), empat komponen utama memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program harus dapat memahami tujuan dan mekanisme kebijakan melalui komunikasi yang jelas dan konsisten. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik anggaran, tenaga pelaksana, maupun sumber daya administratif, merupakan faktor penting yang menentukan seberapa lancar pelaksanaan kebijakan berjalan. Di samping itu, bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan juga dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan yang memahami dan sangat berkomitmen terhadap tujuan program akan memiliki kecenderungan untuk menjalankan kebijakan dengan lebih baik. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang sistematis dan terintegrasi, struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi sangat penting. Oleh karena itu, untuk memahami dinamika pelaksanaan program secara lebih menyeluruh, analisis implementasi kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut.

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, jelas bahwa implementasi Program Indonesia Pintar di tingkat daerah merupakan proses yang rumit yang melibatkan beberapa aktor dan sistem administrasi. Ketidakesesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan dapat memengaruhi kemampuan program untuk mencapai pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, studi tentang implementasi Program Indonesia Pintar di Kota

Probolinggo sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilan dan tantangannya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana Program Indonesia Pintar diterapkan di Kota Probolinggo dari perspektif implementasi kebijakan publik. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan elemen yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program di tingkat daerah serta untuk mengevaluasi seberapa baik pelaksanaan program telah memenuhi tujuan kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kebijakan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di masa depan. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran praktis tentang bagaimana program diterapkan di Kota Probolinggo, tetapi juga dapat memberikan kontribusi akademik untuk membangun studi tentang implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah. kontekstual untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan erat dengan kebijakan publik yang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber tertulis tanpa perlu pengambilan data lapangan secara langsung. Sumber data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta sumber daring yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mencatat berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Probolinggo.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan data secara sistematis sesuai fakta yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka, kemudian mengolah dan menafsirkannya untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dikaji. Pendekatan literatur review memungkinkan peneliti untuk menunjukkan apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui dari suatu topik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan kajian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Dengan demikian, melalui metode ini peneliti berupaya menyajikan pembahasan yang terstruktur dan berbasis sumber yang valid mengenai pelaksanaan kebijakan PIP di Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah merancang Program Pintar Indonesia (PIP) untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Program ini memainkan peran penting dalam membantu siswa memenuhi kebutuhan pendidikan mereka di Kota Probolinggo. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan. Ini termasuk pencairan dana yang tertunda, kurangnya pemahaman orang tua tentang prosedur administrasi, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Untuk menganalisis masalah ini, George C. Edwards III's model implementasi kebijakan digunakan.

Tabel 1. Ringkasan Implementasi PIP di Kota Probolinggo

Variabel	Kondisi di Lapangan	Permasalahan Utama
Komunikasi	Sosialisasi dilakukan melalui sekolah	Orang tua belum paham aktivasi rekening
Sumber Daya	Pelaksana tersedia (sekolah & instansi)	Kesiapan administrasi belum optimal
Disposisi	Pelaksana cukup mendukung program	Pemahaman tidak merata
Struktur Birokrasi	Ada koordinasi antar lembaga	Belum terintegrasi secara optimal

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan salah satu variabel paling menentukan dalam keberhasilan implementasi sebuah program pemerintah, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Probolinggo. Kejelasan pesan yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari sekolah, orang tua, hingga siswa penerima manfaat menjadi prasyarat agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten (Wahab, 2021). Ketika pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, terjadi kekosongan informasi yang mendorong munculnya kebingungan di tingkat paling bawah pelaksanaan program, yakni pada level rumah tangga penerima bantuan (Nugroho, 2018). Kondisi ini memperbesar risiko tertundanya manfaat yang seharusnya diterima oleh siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga tujuan kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tidak tercapai secara optimal (Andina, 2018).

Dalam praktiknya, saluran utama sosialisasi PIP di Kota Probolinggo adalah sekolah, yang mengandalkan guru kelas dan operator sekolah untuk menyampaikan informasi kepada orang tua siswa. Mekanisme ini memang cukup efisien secara struktural, namun mengandung kelemahan mendasar karena tidak semua tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama dan mendalam mengenai prosedur teknis aktivasi rekening serta alur pencairan dana (Kemendikbud RI, 2021). Ketidakeragaman pemahaman di antara para pelaksana di lapangan menyebabkan informasi yang diterima oleh orang tua menjadi tidak konsisten sebagian orang tua mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap, sementara sebagian lainnya hanya menerima informasi yang sangat minimal (Handayani & Kurniasih, 2021). Disparitas ini secara langsung berdampak pada kemampuan orang tua untuk menyelesaikan prosedur administrasi yang diperlukan, termasuk aktivasi rekening di bank penyalur yang menjadi syarat utama pencairan bantuan.

Secara teoritis, komunikasi kebijakan yang efektif harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu transmisi yang akurat, konsistensi pesan, dan kejelasan isi (Agustino, 2020). Transmisi yang akurat berarti informasi harus sampai kepada semua pihak yang relevan tanpa distorsi, sementara konsistensi mengharuskan pesan yang disampaikan oleh berbagai pihak memiliki substansi yang sama (Subarsono, 2019). Dalam konteks implementasi PIP di Kota Probolinggo, ketiga unsur ini belum terpenuhi secara memadai, terutama pada aspek konsistensi dan kejelasan informasi tentang mekanisme aktivasi rekening, jadwal

pencairan, dan persyaratan administrasi lainnya (Wahab, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi kebijakan bukan semata-mata soal apakah informasi telah disampaikan atau belum, melainkan sejauh mana kualitas penyampaian tersebut mampu menghasilkan pemahaman yang benar di tingkat penerima manfaat.

Hambatan komunikasi kebijakan juga diperparah oleh keterbatasan literasi administratif di kalangan orang tua siswa dari keluarga kurang mampu, yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah dan kurang terbiasa dengan prosedur birokratis yang kompleks (Kurniawan, 2020). Penjelasan teknis mengenai pembukaan rekening, penggunaan kartu, serta batas waktu pencairan dana sering kali tidak dipahami secara utuh oleh kelompok sasaran ini, meskipun informasi tersebut secara formal telah disampaikan (Pratiwi, 2019). Kebutuhan akan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, adaptif, dan berorientasi pada pemahaman praktis menjadi sangat mendesak agar kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pemahaman penerima manfaat dapat diminimalkan (Handayani & Kurniasih, 2021). Tanpa pembenahan pada aspek ini, upaya perluasan akses pendidikan melalui PIP akan terus terhambat oleh masalah yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui perbaikan strategi komunikasi yang lebih terencana dan sistematis.

Untuk memastikan efektivitas komunikasi kebijakan, diperlukan perluasan saluran sosialisasi yang tidak hanya bertumpu pada jalur formal sekolah, tetapi juga memanfaatkan pendekatan komunitas seperti pertemuan warga, kunjungan langsung ke rumah penerima bantuan, serta pemanfaatan media digital yang kini semakin terjangkau (Dunn, 2018). Pelatihan komunikasi bagi operator sekolah dan guru yang berperan sebagai ujung tombak sosialisasi PIP perlu dilakukan secara berkala agar mereka mampu menyampaikan informasi dengan tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh orang tua dari berbagai latar belakang pendidikan (Kemendikbud RI, 2021). Evaluasi terhadap efektivitas sosialisasi yang selama ini dilakukan juga perlu diperkuat dengan mekanisme umpan balik yang memungkinkan pemerintah dan sekolah mengetahui sejauh mana orang tua benar-benar memahami prosedur program (Agustino, 2020). Peningkatan kualitas komunikasi kebijakan pada akhirnya bukan hanya soal efisiensi administrasi, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap warga yang berhak mendapatkan manfaat dari program sosial benar-benar dapat mengaksesnya tanpa hambatan yang bersumber dari ketidaktahuan.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan fondasi utama yang menentukan apakah sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, dan hal ini berlaku penuh dalam konteks pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Probolinggo. Sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak hanya mencakup anggaran, tetapi juga meliputi sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas pendukung, serta infrastruktur administrasi yang memadai untuk mengelola program secara efektif (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Tanpa dukungan ketiga elemen tersebut secara bersamaan, program yang dirancang dengan tujuan mulia pun dapat terhambat pada tahap pelaksanaan karena ketidakmampuan para pelaksana dalam mengelola beban kerja administratif yang dituntut oleh sistem penyaluran bantuan (Subarsono, 2019). Realitas ini terlihat nyata dalam implementasi PIP di Kota Probolinggo, di mana ketersediaan tenaga pelaksana secara nominal relatif mencukupi, namun kapasitas teknis dan kesiapan administratif mereka belum merata di seluruh satuan pendidikan yang terlibat.

Dari sisi sumber daya manusia, sekolah-sekolah di Kota Probolinggo yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis PIP menghadapi tantangan berupa beban kerja ganda yang dipikul oleh operator sekolah, yakni mengelola sistem administrasi akademik sekaligus menangani proses pendataan, verifikasi, dan pelaporan penerima bantuan PIP (Handayani & Kurniasih, 2021). Kondisi ini menciptakan tekanan tersendiri yang berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan program, terutama ketika tenaga operator sekolah tidak mendapatkan pelatihan teknis yang memadai mengenai sistem informasi penyaluran dana yang digunakan (Kemendikbud RI, 2021). Selain itu, pergantian tenaga operator sekolah yang cukup sering terjadi menjadi faktor tambahan yang mengganggu kesinambungan pelaksanaan program karena operator baru membutuhkan waktu adaptasi yang tidak sedikit sebelum mampu menjalankan tugas pengelolaan data PIP secara mandiri dan akurat (Kurniawan, 2020). Akumulasi persoalan ini memperjelas bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaksana merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lebih lama.

Dari sisi infrastruktur administratif, proses verifikasi data penerima PIP di Kota Probolinggo masih menghadapi kendala teknis yang berkaitan dengan akurasi dan keterbaruan data siswa yang diintegrasikan dengan sistem pusat (Agustino, 2020). Kesalahan atau keterlambatan dalam pemutakhiran data, seperti perubahan status ekonomi keluarga, perpindahan sekolah, atau ketidaksesuaian identitas, seringkali menjadi penyebab utama tertundanya proses pencairan bantuan bagi siswa yang seharusnya sudah memenuhi syarat (Andina, 2018). Sistem pendataan yang belum sepenuhnya digital dan terpadu di seluruh lembaga terkait mulai dari dinas pendidikan, bank penyalur, hingga sekolah memperlambat alur kerja administratif dan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan yang merugikan penerima manfaat (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Kebutuhan mendesak akan digitalisasi sistem administrasi PIP yang terpadu menjadi salah satu rekomendasi utama yang perlu segera diwujudkan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses penyaluran bantuan.

Dari perspektif anggaran, alokasi dana PIP secara nasional memang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan kuantitas anggaran tersebut tidak otomatis diikuti oleh peningkatan kapasitas pelaksana di tingkat daerah untuk mengelola dana secara tepat sasaran dan tepat waktu (Dunn, 2018). Terdapat jeda yang signifikan antara penetapan kuota penerima di tingkat pusat dengan kesiapan mekanisme penyaluran di tingkat sekolah dan lembaga mitra, sehingga dana yang secara nominal tersedia tidak selalu dapat dicairkan sesuai jadwal yang ditetapkan (Kemendikbud RI, 2021). Ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dan kapasitas pengelolaan ini mencerminkan bahwa persoalan sumber daya dalam implementasi PIP bukan hanya persoalan besaran dana, melainkan juga persoalan kesiapan sistem dan manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaannya (Subarsono, 2019). Penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola program bantuan pendidikan perlu didukung oleh kebijakan pendampingan teknis yang berkelanjutan dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, persoalan sumber daya dalam implementasi PIP di Kota Probolinggo mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial di daerah dengan kapasitas administratif yang terbatas (Mulyadi, 2016). Peningkatan sumber daya tidak hanya berarti penambahan anggaran atau tenaga, tetapi juga mencakup pembenahan sistem, penguatan kapasitas teknis, dan pembangunan infrastruktur administratif yang responsif terhadap kebutuhan lapangan (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Program pelatihan yang dirancang secara sistematis,

berbasis kebutuhan nyata pelaksana di lapangan, serta dijalankan secara berkala akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan dibandingkan pendekatan pelatihan yang bersifat insidental dan tidak terstruktur (Kurniawan, 2020). Investasi pada pengembangan sumber daya ini, meskipun membutuhkan komitmen jangka panjang, merupakan syarat mutlak agar PIP mampu memberikan manfaat yang nyata dan merata bagi seluruh siswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran program.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana, yakni sikap, komitmen, dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak yang menjalankan kebijakan di lapangan, merupakan variabel yang sering kali menentukan kualitas implementasi secara lebih langsung dibandingkan faktor teknis lainnya. Dalam kerangka teori Edwards III yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, disposisi pelaksana yang positif dan konsisten dengan tujuan kebijakan akan mendorong pelaksanaan yang lebih baik, sementara disposisi yang ambivalen atau berlawanan dengan tujuan program akan menghasilkan implementasi yang tidak optimal meskipun seluruh sumber daya sudah tersedia (Agustino, 2020). Pelaksana yang memahami secara mendalam mengapa program ini penting bagi kelompok sasaran akan cenderung mengambil inisiatif lebih dalam menyelesaikan hambatan-hambatan teknis yang ditemukan di lapangan, dibandingkan pelaksana yang sekadar menjalankan prosedur tanpa penghayatan terhadap nilai keadilan sosial yang menjadi spirit program (Subarsono, 2019). Karena itulah, pembentukan disposisi yang tepat melalui pemahaman, pelatihan, dan internalisasi nilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi implementasi kebijakan yang komprehensif.

Di Kota Probolinggo, secara umum para pelaksana PIP termasuk kepala sekolah, guru, operator, dan petugas dinas pendidikan menunjukkan sikap yang cukup mendukung terhadap keberlangsungan program, terutama karena mereka secara langsung menyaksikan dampak positif bantuan tersebut terhadap kelangsungan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu (Pratiwi, 2019). Komitmen moral para guru dan tenaga kependidikan ini menjadi modal sosial yang penting dalam menopang jalannya program di tengah berbagai keterbatasan administratif dan teknis yang ada (Handayani & Kurniasih, 2021). Namun demikian, komitmen yang bersifat personal dan afektif ini belum sepenuhnya ditopang oleh pemahaman teknis yang memadai, sehingga niat baik para pelaksana tidak selalu dapat dikonversi menjadi tindakan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Kemendikbud RI, 2021). Kesenjangan antara motivasi pelaksana dan kapasitas teknis mereka ini menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi melalui pendekatan pengembangan kapasitas yang terintegrasi.

Salah satu tantangan paling nyata dari sisi disposisi pelaksana adalah variasi pemahaman yang cukup besar di antara para pelaksana mengenai mekanisme teknis program, baik yang berkaitan dengan prosedur pendataan, verifikasi penerima, aktivasi rekening, maupun penanganan kasus pengaduan dari orang tua siswa (Kurniawan, 2020). Variasi ini tidak hanya terjadi antarsatuan pendidikan, tetapi juga di dalam satu sekolah yang sama, di mana guru kelas kadang memiliki pemahaman yang berbeda dengan operator sekolah mengenai alur dan persyaratan administrasi PIP (Wahab, 2021). Kondisi ini menciptakan inkonsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada orang tua dan siswa, sehingga sebagian penerima manfaat mendapatkan bimbingan yang lebih lengkap sementara sebagian lainnya dibiarkan meraba-raba prosedur yang harus mereka penuhi (Andina, 2018). Ketidakkonsistenan ini pada gilirannya berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan pencairan bantuan, yang merupakan indikator paling terasa dari efektivitas

implementasi program.

Persoalan disposisi pelaksana juga berkaitan erat dengan budaya birokrasi yang berkembang di satuan-satuan pelaksana program, di mana rutinitas administratif seringkali lebih diprioritaskan daripada upaya aktif untuk memastikan bahwa setiap siswa yang berhak benar-benar mendapatkan manfaat program (Mulyadi, 2016). Orientasi pada pemenuhan laporan formal dan kepatuhan prosedural, meskipun penting, tidak boleh menggantikan orientasi pada hasil nyata berupa akses pendidikan yang terbuka bagi kelompok rentan (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Pergeseran orientasi ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat di tingkat sekolah dan dinas pendidikan untuk mendorong pelaksana agar tidak sekadar menjalankan mekanisme program secara mekanis, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan akses pendidikan siswa kurang mampu (Tilaar, 2017). Kepemimpinan yang transformatif dan berorientasi pada dampak sosial program menjadi faktor kunci yang dapat mengubah disposisi pelaksana dari sekadar kepatuhan prosedural menjadi komitmen substantif terhadap tujuan kebijakan.

Penguatan disposisi pelaksana dalam jangka panjang memerlukan pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga dimensi pemahaman nilai dan tujuan sosial dari program bantuan pendidikan seperti PIP (Hasbullah, 2017). Internalisasi nilai keadilan pendidikan perlu dilakukan melalui forum-forum diskusi, refleksi bersama, dan pendalaman dampak program yang dilaksanakan secara berkala di antara seluruh pemangku kepentingan pelaksana (Tilaar, 2017). Mekanisme penghargaan dan umpan balik yang transparan terhadap kinerja pelaksana juga dapat menjadi instrumen efektif untuk membentuk disposisi yang lebih konsisten dan berorientasi pada kualitas layanan (Agustino, 2020). Dengan fondasi disposisi pelaksana yang kuat yang dibangun di atas pemahaman mendalam, komitmen nilai, dan kapasitas teknis yang mumpuni implementasi PIP memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh siswa dari keluarga yang membutuhkan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas, terorganisasi, dan koordinatif merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kota Probolinggo. Struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan tidak hanya merujuk pada hirarki organisasional, tetapi juga mencakup mekanisme koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta keberadaan prosedur operasional baku yang memandu setiap tahap pelaksanaan program secara sistematis (Wahab, 2021). Ketika struktur birokrasi tidak tertata dengan baik, fragmentasi kewenangan dan ketidakjelasan alur kerja akan menjadi hambatan yang berulang, mengakibatkan tumpang tindih tugas di satu sisi dan kekosongan tanggung jawab di sisi lain (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Realitas ini sangat relevan dengan kondisi implementasi PIP di Kota Probolinggo, di mana rantai birokrasi yang panjang mulai dari pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah, sekolah, hingga bank penyalur berpotensi besar menciptakan celah koordinasi yang berdampak langsung pada kecepatan dan akurasi penyaluran bantuan.

Dalam skema pelaksanaan PIP, alur kerja melibatkan setidaknya empat lapis institusi yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang saling berkaitan namun secara operasional bekerja dalam sistem yang belum sepenuhnya terpadu (Kemendikbud RI, 2021). Pemerintah pusat menetapkan kuota dan kebijakan teknis, dinas pendidikan

daerah berperan sebagai koordinator di tingkat lokal, sekolah bertanggung jawab atas pendataan dan verifikasi calon penerima, sementara bank penyalur mengelola proses pencairan dana kepada siswa (Subarsono, 2019). Ketika salah satu mata rantai dalam alur ini mengalami hambatan baik karena keterlambatan data, perbedaan interpretasi prosedur, maupun lambatnya respons terhadap permasalahan teknis dampaknya akan terasa di seluruh rantai proses dan berujung pada tertundanya bantuan yang diterima oleh siswa (Agustino, 2020). Kompleksitas struktural ini menuntut mekanisme koordinasi yang kuat dan proaktif, bukan sekadar koordinasi reaktif yang hanya diaktifkan ketika masalah sudah muncul di permukaan.

Salah satu persoalan struktural yang paling menonjol dalam implementasi PIP di Kota Probolinggo adalah belum adanya platform koordinasi yang terpadu dan real-time antara sekolah, dinas pendidikan, dan bank penyalur, sehingga konfirmasi status pencairan dana seringkali harus dilakukan melalui jalur komunikasi informal yang tidak terstandarisasi (Handayani & Kurniasih, 2021). Ketiadaan sistem monitoring terpadu ini menyebabkan informasi mengenai status penerima, kendala aktivasi rekening, atau permasalahan teknis lainnya tidak dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara sistematis oleh pihak yang berwenang (Nugroho, 2018). Lebih jauh lagi, prosedur operasional baku yang seharusnya menjadi panduan seragam bagi seluruh pelaksana di lapangan masih belum dipahami dan diterapkan secara konsisten di semua satuan pendidikan yang terlibat dalam program (Mulyadi, 2016). Ketimpangan dalam penerapan prosedur ini menghasilkan variasi kualitas layanan yang cukup signifikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, yang pada akhirnya berpengaruh pada pengalaman penerima manfaat dalam mengakses hak mereka atas bantuan pendidikan.

Secara teoretis, Edwards III menegaskan bahwa fragmentasi birokrasi adalah salah satu hambatan struktural paling serius dalam implementasi kebijakan, karena ia menghalangi terbentuknya kesatuan tindakan yang konsisten dan terarah menuju tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (Agustino, 2020). Fragmentasi ini tidak hanya terjadi secara horizontal antarlembaga yang berbeda, tetapi juga secara vertikal antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan kapasitas pelaksanaan yang tersedia di tingkat daerah (Wahab, 2021). Dalam kasus PIP di Kota Probolinggo, jarak antara kebijakan nasional yang dirancang secara komprehensif dengan realitas kapasitas administratif di tingkat sekolah masih cukup lebar, dan celah ini membutuhkan jembatan berupa mekanisme dukungan teknis, pemantauan aktif, dan evaluasi berkala yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada satuan pendidikan (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Tanpa penjembaran yang sistematis, fragmentasi birokrasi akan terus menjadi sumber masalah yang berulang dalam setiap siklus penyaluran bantuan.

Pembenahan struktur birokrasi pelaksana PIP memerlukan pendekatan reformasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menyentuh budaya kerja birokrasi yang selama ini lebih berorientasi pada kepatuhan formal daripada efektivitas pelayanan kepada penerima manfaat (Mulyadi, 2016). Pembentukan gugus tugas koordinasi terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan lintas sektor termasuk dinas pendidikan, dinas sosial, bank penyalur, dan perwakilan sekolah dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat integrasi antarlembaga dalam pengelolaan program (Subarsono, 2019). Penetapan standar prosedur operasional yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan, disertai dengan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pemantauan progres secara real-time, akan sangat membantu dalam mendeteksi hambatan lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang berdampak pada penerima manfaat (Kemendikbud

RI, 2021). Reformasi struktural birokrasi pelaksana PIP, apabila dilakukan secara terencana dan konsisten, akan menjadi investasi kelembagaan yang memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi program ini, tetapi juga bagi pengelolaan program-program perlindungan sosial lainnya yang diselenggarakan di Kota Probolinggo.

Tabel 2. Permasalahan Nyata Implementasi PIP

Permasalahan	Dampak	Upaya Perbaikan
Keterlambatan pencairan dana	Siswa terlambat menerima bantuan	Perbaikan sistem penyaluran
Kurangnya pemahaman orang tua	Dana tidak segera dicairkan	Peningkatan sosialisasi
Koordinasi lemah	Program tidak berjalan optimal	Penguatan komunikasi antar lembaga
Kesiapan administrasi rendah	Proses lambat	Digitalisasi dan pelatihan

Analisis Tantangan

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kota Probolinggo menghadapi serangkaian tantangan yang bersifat multidimensi dan saling berkaitan erat satu sama lain, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui intervensi tunggal yang bersifat parsial. Tantangan-tantangan ini mencakup dimensi komunikasi, kapasitas sumber daya, konsistensi disposisi pelaksana, dan koordinasi struktur birokrasi yang secara keseluruhan membentuk ekosistem implementasi yang belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya tujuan kebijakan (Wahab, 2021). Memahami tantangan-tantangan ini secara komprehensif sangat penting agar rekomendasi perbaikan yang dirumuskan benar-benar menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menangani gejala yang tampak di permukaan (Dunn, 2018). Ketika analisis terhadap tantangan implementasi dilakukan secara mendalam, ia tidak hanya mengungkap kelemahan teknis program, tetapi juga membuka pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika tata kelola kebijakan sosial di tingkat daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi PIP di Kota Probolinggo adalah gap yang cukup dalam antara desain kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan kapasitas eksekusi yang tersedia di tingkat sekolah sebagai satuan pelaksana terdepan (Subarsono, 2019). Kebijakan nasional yang dirancang dengan asumsi ketersediaan infrastruktur administratif dan kompetensi teknis tertentu, ketika bersentuhan dengan realitas lapangan yang berbeda-beda di setiap daerah, seringkali menghadapi gesekan yang mengakibatkan distorsi pada proses pelaksanaan (Purwanto & Sulistyastuti, 2017). Di Kota Probolinggo, keterbatasan kapasitas ini terlihat nyata pada belum meratanya kemampuan operator sekolah dalam mengelola sistem data penerima PIP, yang berdampak langsung pada akurasi dan ketepatan waktu proses verifikasi serta pencairan dana (Andina, 2018). Persoalan ini menegaskan bahwa dalam merancang kebijakan sosial yang memerlukan keterlibatan aktif satuan pelaksana di tingkat daerah, kesiapan kapasitas lokal harus menjadi variabel yang diperhitungkan sejak awal proses perencanaan kebijakan.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan ketimpangan akses informasi yang dialami oleh kelompok sasaran program, yakni siswa dari keluarga kurang mampu yang dalam

banyak kasus justru memiliki kapasitas paling terbatas untuk menavigasi prosedur administratif yang kompleks (Pratiwi, 2019). Orang tua yang berpendidikan rendah dan tidak terbiasa berurusan dengan perbankan atau prosedur birokrasi sering kali menghadapi kebingungan di setiap tahap proses pencairan bantuan, mulai dari pemahaman tentang kriteria penerima, cara aktivasi rekening, hingga penggunaan dana sesuai peruntukannya (Kurniawan, 2020). Kesenjangan informasi ini menciptakan situasi paradoks di mana kelompok yang paling membutuhkan bantuan justru menghadapi hambatan terbesar untuk mengaksesnya, sementara kelompok dengan kapasitas informasi yang lebih baik relatif lebih mudah menavigasi sistem (Handayani & Kurniasih, 2021). Mengatasi kesenjangan ini memerlukan strategi komunikasi kebijakan yang secara eksplisit dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka.

Tantangan dalam dimensi kelembagaan juga tidak kalah kompleksnya, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam rantai panjang pelaksanaan PIP, mulai dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan, sekolah, Dinas Sosial, hingga bank penyalur (Mulyadi, 2016). Setiap institusi dalam rantai ini memiliki sistem, prosedur, dan prioritas kerja yang berbeda-beda, dan tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, perbedaan-perbedaan ini akan menimbulkan friksi yang secara kumulatif memperlambat seluruh proses penyaluran bantuan (Nugroho, 2018). Persoalan koordinasi ini semakin diperumit oleh fakta bahwa tidak terdapat satu entitas tunggal yang memiliki otoritas penuh untuk mengawasi dan mengarahkan seluruh rantai pelaksanaan program secara terpadu di tingkat daerah, sehingga masalah yang muncul di satu simpul seringkali membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan karena harus melalui jalur komunikasi yang panjang dan tidak terstandarisasi (Agustino, 2020). Pembangunan mekanisme tata kelola lintas sektor yang efektif menjadi salah satu rekomendasi paling mendesak untuk memperkuat kapasitas koordinasi dalam penyelenggaraan program-program perlindungan sosial di daerah.

Pada level yang lebih makro, tantangan implementasi PIP di Kota Probolinggo juga mencerminkan tantangan yang lebih umum dalam kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, di mana tanggung jawab pelaksanaan program nasional didelegasikan ke daerah tanpa selalu disertai dengan penguatan kapasitas yang sepadan (Tilaar, 2017). Program perlindungan sosial berbasis pendidikan seperti PIP menuntut sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat bertanggung jawab untuk menyediakan sistem, panduan teknis, dan pemantauan, sementara daerah bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal (Dunn, 2018). Tanpa keseimbangan sinergi ini, program yang dirancang dengan baik di tingkat nasional akan terus menghadapi hambatan implementasi yang berulang di tingkat daerah, menciptakan siklus frustrasi bagi pelaksana sekaligus menunda manfaat yang seharusnya diterima oleh siswa yang berhak (Kemendikbud RI, 2021). Memutus siklus ini memerlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan, dari level penentu kebijakan nasional hingga guru kelas di sekolah-sekolah terpencil, untuk menempatkan kepentingan terbaik penerima manfaat sebagai kompas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan program (Pratiwi, 2019).

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Probolinggo belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, komunikasi kebijakan belum efektif menyebabkan kesalahpahaman

antara pihak penerima, dalam hal ini siswa dengan penyalur dana. Kedua, sumber daya yang belum siap secara merata, yang menyebabkan munculnya berbagai kendala teknis dan administratif, seperti terhambatnya proses verifikasi dan pengelolaan data penerima. Ketiga, disposisi pelaksanaan yang belum merata, sehingga pemahaman terhadap mekanisme program berbeda-beda dan berdampak pada ketidakkonsistenan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keempat, struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik, sehingga menyebabkan keterlambatan informasi dan pelaksanaan program yang belum berjalan sesuai harapan. Kondisi tersebut berdampak langsung di lapangan, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman orang tua terhadap prosedur, serta pelaksanaan program yang belum maksimal. Meskipun demikian, Program Indonesia Pintar peran penting untuk mengakses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diharapkan dapat membantu siswa untuk tetap bersekolah serta dapat terbantu oleh program tersebut untuk meringankan beban ekonomi orang tua. Oleh karena itu apabila berbagai permasalahan pada faktor-faktor utama tersebut dapat diperbaiki secara serius dan tepat sasaran, maka pelaksanaan program ini berpotensi menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi penerima.

Guna meningkatkan efektivitas implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Probolinggo, pemerintah dan pihak sekolah perlu memperkuat mekanisme sosialisasi dengan menyajikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh orang tua siswa, khususnya menyangkut prosedur administrasi aktivasi rekening dan alur pencairan dana. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana melalui pelatihan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan juga menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan pembaruan sistem administrasi berbasis digital yang dapat mempercepat proses verifikasi data dan memastikan penyaluran bantuan berlangsung tepat waktu serta tepat sasaran. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, bank penyalur, dan lembaga terkait lainnya perlu diperkuat melalui pembentukan mekanisme komunikasi lintas sektor yang lebih terpadu dan responsif, sehingga setiap hambatan yang muncul dalam proses penyaluran dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara sistematis. Evaluasi dan pengawasan terhadap setiap tahap penyaluran dana perlu dilakukan secara berkala dan terstandarisasi untuk memastikan program benar-benar menjangkau siswa yang berhak menerimanya, sehingga dengan perbaikan yang menyeluruh pada aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi birokrasi, Program Indonesia Pintar berpotensi memberikan manfaat yang jauh lebih nyata dan merata bagi masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Andina, E. (2018). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 9(2), 193–204. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1112>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2023). *Kabupaten Probolinggo dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Handayani, T., & Kurniasih, D. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar dalam pemerataan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.4312>

- Hasbullah. (2017). Dasar-dasar ilmu pendidikan. Rajawali Pers.
- Kemendikbud RI. (2021). Petunjuk teknis Program Indonesia Pintar tahun 2021. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://pip.kemdikbud.go.id>
- Kurniawan, A. (2020). Kebijakan pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Program Indonesia Pintar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 120–132. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1765>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2018). Public policy. PT Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, I. (2019). Dampak Program Indonesia Pintar terhadap keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 7(3), 150–159. <https://doi.org/10.17977/um030v7i32019p150>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
- Raco, J. R. (2018). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. Grasindo.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Subarsono. (2019). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2018). Metodologi penelitian. Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2017). Kekuasaan dan pendidikan. Rineka Cipta.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Bumi Aksara.
- Yusuf, A. M. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. Kencana.